

SELURUH PEMDA KALBAR BERADA DI ZONASI HIJAU

Jum'at, 06 Desember 2024 - kalbar

Pontianak, Sonora.ID - Ombudsman Republik Indonesia telah mengumumkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten dalam acara penganugerahan yang digelar pada Kamis (14/11/2024) di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara nasional sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2020-2024 telah menjadi salah satu ukuran mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara di tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten.

Pada tahun 2024, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah penyelenggara dalam zona hijau, yang meningkat drastis dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024. Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penilaian Kepatuhan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.

"Secara durasi waktu lumayan panjang, dimulai dari persiapan Juknis dari Ombudsman Jakarta kemudian kami melakukan sosialisasi. Sebelumnya dilakukan pendampingan terlebih dahulu, pengambilan data, supervisi, pengolahan data, dan selebrasi hari ini," jelas Kepala Ombudsmas Perwakilan Kalbar, Tariyah.

Berdasarkan hasil akhir penilaian, terdapat 22 Kementerian, 11 Lembaga, 28 Pemerintah Provinsi, 94 Pemerintah Kota dan 339 Pemerintah Kabupaten yang memperoleh Prestikat Zonasi Hijau Opini Kepatuhan Kualitas Tertinggi dan Tinggi.

Dalam Penghargaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan penghargaan sebagai peringkat ke tujuh tingkat Pemerintah Provinsi dengan nilai 95.65 (Zona Hijau Kepatuhan Kualitas Tertinggi).

Berdasarkan hasil penilaian yang dirilis pada acara sesuai dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik), seluruh Pemda di Kalimantan Barat berada dalam Zonasi Hijau Kepatuhan seperti berikut:

Sembilan Pemda memperoleh predikat Zonasi Hijau Kepatuhan Kualitas Tertinggi, antara lain:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (95,05), Pemerintah Kota Pontianak (94,96),
- Pemerintah kota Singkawang (93,50), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (91,90),
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (91,90),
- Pemerintah Kabupaten Ketapang (89,80),
- Pemerintah Kabupaten Sambas (89,61),
- Pemerintah Kabupaten Mempawah (89,55) dan

- Pemerintah Kabupaten Sintang (89,14)

Sementara itu, 6 (enam) Pemda memperoleh predikat Zonasi Hijau Kepatuhan Kualitas Tertinggi, antara lain:

- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (87,65),
- Pemerintah Kabupaten Sanggau (87,25),
- Pemerintah Kabupaten Landak (85,76),
- Pemerintah Kabupaten Sekadau (82,66),
- Pemerintah Kabupaten Bengkayang (81,30), dan
- Pemerintah Kabupaten Melawi (78,13).